



iMProvement

Jurnal Ilmiah Untuk Peningkatan Mutu Pendidikan

e-ISSN: 2597-8039

Journal Homepage: <http://journal.unj.ac.id/unj/index.php/improvement>

Journal Email: improvement@unj.ac.id



**MODEL TRANSPARANSI TATAKELOLA SEKOLAH DASAR NEGERI (SDN)
DI WILAYAH JAKARTA TIMUR**

Nurhattati¹

nurhattati@unj.ac.id

¹Universitas Negeri Jakarta

Fadhillah²

fadhillah@serambimekkah.ac.id

²Universitas Serambi Mekkah

Ahmad Jauhari HR³

ahmadjauhari@stkipkusumanegara.ac.id

³STKIP Kusumanegara

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan praktik/penerapan transparansi kepala sekolah dalam tata kelola sekolah untuk menganalisis kebutuhan sistem informasi tata kelola sekolah sebagai dasar penyusunan model transparansi tata kelola SDN. Menggunakan metode survei dengan teknik pengumpulan data berupa angket yang diisi oleh 248 pengurus komite sekolah dari 40 sekolah dasar, diperkaya dengan diskusi terfokus dengan 40 kepala sekolah dan 40 guru. Hasil kuesioner disajikan dan dianalisis secara kualitatif. Hasil diskusi terfokus dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi tata kelola sekolah dasar negeri di Kota Jakarta Timur berada pada kategori cukup, namun berpotensi untuk dikembangkan melalui sistem informasi tata kelola sekolah sehingga model hipotetik sistem pemerintahan transparan di SDN dapat ditarik. Untuk itu disarankan kepada Dinas DKI Jakarta perlu memfasilitasi pengadaan sistem dengan perangkat pendukungnya, baik IT advisor maupun sumber daya operator. Sekolah harus merespon positif jika transparansi dalam tata kelola sekolah diterapkan.

Kata Kunci: transparansi, tatakelola

**TRANSPARENCY MODEL OF STATE SCHOOL GOVERNANCE (SDN)
IN THE EAST JAKARTA REGION**

Abstract: This study aims to describe the practice/application of the principal of transparency in school governance to analyze the need for a school governance information system as the basis for the preparation of a model for SDN governance transparency. Using a survey method with data collection techniques in the form of a questionnaire filled out by 248 school committee administrators from 40 elementary schools, enriched by focused discussions with 40 principals and 40 teachers. The results of the questionnaire were presented and analyzed qualitatively. The results of the focused discussion were analyzed qualitatively. The results of the study show that the transparency of public elementary school governance in East Jakarta City is in the sufficient category, but has the potential to be developed through a school governance information system so that a hypothetical model of the transparent governance system in SDN can be drawn up. For this reason, it is recommended that the DKI Jakarta Office needs to facilitate the procurement of systems with supporting devices, both IT advise and operator resources. Schools must respond positively if transparency in school governance is implemented.

Keywords: transparency, governance

PENDAHULUAN

Iklim demokrasi di Indonesia yang diawali gerakan reformasi pada tahun 1998, berkembang dan bergeser ke arah reformasi birokrasi sebagai upaya pembaharuan dan perubahan sistem penyelenggaraan pemerintahan (Peraturan Presiden No 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, 2010). Keberhasilan reformasi birokrasi sangat menentukan terwujudnya *good governance* dalam pelayanan publik yang berkualitas, dikarenakan terjadinya *participation, rule of law, transparency, responsiveness, consensus of orientation, equity, effectiveness and efficiency accountability and strategic vision* (UNDP, 1997). *Good governance* di tingkat satuan pendidikan di Indonesia diimplementasikan melalui kebijakan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) yang mengusung prinsip kemandirian, keadilan, keterbukaan, kemitraan, partisipasi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan Pendidikan (Undang-Undang Sisdiknas, 2003). MBS merupakan bentuk otonomi pendidikan pada satuan pendidikan dengan pemberian kewenangan dan kemandirian, serta pengembangan swakarya, swadana, swakelola, dan swasembada dalam pengelolaan sumberdaya oleh sekolah (Cheong, 1996).

Sekolah sebagai penyedia layanan public pada sektor pendidikan, dituntut memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat. Namun demikian pada kenyataannya masyarakat menganggap sekolah belum memenuhi harapan, karena ternyata sarana prasarana pendidikan belum memadai (Kompas, 2012), akses pendidikan belum merata (Ekonomi, 2021), selain

pengelolaan sekolah belum dilakukan secara transparan (Merdeka, 2014). Padahal menurut (Sagala, 2013), penyusunan rencana pengembangan sekolah dengan prinsip partisipatif, transparan dan akuntabel berhasil merumuskan sasaran dan program kegiatan yang memungkinkan dapat diimplementasikan. (Raeni, 2014) menemukan bahwa prinsip keadilan, efisiensi, dan transparansi pengelolaan keuangan secara simultan berpengaruh positif terhadap produktivitas sekolah. Bahkan (Joshi, 2013) menyimpulkan "*that a range of accountability initiatives have been effective in their immediate goals, and that there is also strong evidence of impact on public services in a range of cases, but that evidence of impact on the quality and accessibility of services is more mixed.*"

Paparan di atas, menunjukkan betapa pentingnya transparansi dalam tatakelola sekolah, karena selain mampu menstimulasi partisipasi orang tua, juga dapat mengefisiensikan anggaran sekolah (Nurhattati, 2017). Namun menjadi sebuah fakta bahwa sampai saat ini belum semua sekolah menjalankan tatakelola yang baik, terutama terkait dengan transparansi tatakelola sekolah. Banyak faktor yang diduga penyebab prinsip *good governance* di sekolah, terutama di SD belum berjalan sesuai harapan. Diantaranya adalah status sekolah (swasta dan negeri), status akreditasi (Wardani et al., 2019). Selain belum adanya model transparansi tatakelola sekolah yang dapat dijadikan rujukan dalam pengelolaan sekolah. Sebenarnya telah banyak dilakukan penelitian tentang transparansi di sekolah (Ardani & Trihantoyo, 2020; Daniel Aditya Utama, 2014; Dwiharja & Kurrohman, 2017; Nurdiani &

Nugraha, 2018; Shafirattunnisa, 2016), namun hanya mengkaji transparansi dalam pengelolaan keuangan, tidak mengkaji transparansi tatakelola sekolah secara menyeluruh yang mencakup semua komponen pengelolaan sekolah. Selain itu, belum ada penelitian yang merekomendasikan model transparansi tatakelola sekolah sesuai kebutuhan dan kondisi SDN dalam konteks Indonesia.

Penelitian sebelumnya tentang transparansi di SDN telah dilakukan, tepatnya di Kecamatan Pulo Gadung Jakarta Timur. Penelitian tersebut berhasil membuktikan bahwa transparansi pengelolaan keuangan berpengaruh terhadap partisipasi orang tua siswa. Selain itu dapat diungkap SDN pada umumnya memiliki masalah dalam transparansi pengelolannya (Nurhattati, 2020) (2019). Menindak lanjuti hasil penelitian tersebut, dilakukan pengembangan penelitian dengan memperluas cakupan substansi dan wilayahnya yang bertujuan menghasilkan hal baru berupa konsep model transparansi tatakelola sekolah sesuai kebutuhan dan karakteristiknya, guna melakukan penguatan implementasi MBS di SDN. Secara spesifik penelitian memfokus pada penggambaran praktik/penerapan prinsip transparansi tatakelola sekolah guna menganalisis kebutuhan sistem informasi tatakelola sekolah SDN di Kota Jakarta Timur sebagai dasar penyusunan model transparansi tatakelola SDN.

KAJIAN TEORITIK

Transparansi, dalam sehari-hari sering diartikan “terang, jelas, terbuka”. Namun dalam penggunaannya, sering diartikan sesuai perspektif, dan tujuan penggunaannya (Bozbayindir, 2016). Transparansi diartikan

sebagai pelaksanaan urusan publik di tempat terbuka yang diawasi publik, agar keputusan yang dibuat tersedia, diterima dan dipahami (Fitzsimons, 2015, Parker et al., 2000, (Fitzsimons, 2015). Transparansi sebagai “*the perceived quality of intentionally shared information from a sender* (Schackenberg & Tomlinson, 2020). Selanjutnya, transparansi pengelolaan terkait dengan “*the principle of enabling the public to gain about the operation and structures of a given entity. Transparency is often considered as synonymous with openness and disclosure* (Etzioni, 2010). Dengan demikian, transparansi pengelolaan sekolah adalah proses menjadikan seluruh informasi tentang sekolah jelas, terbuka, mudah dipahami dan siap diakses oleh setiap orang (Mann, 2019, François Robichaud, 2013).

Penyelenggaraan organisasi sangat ditentukan faktor sejauhmana tingkat transparansi diwujudkan (Istikhomah, 2019). Partisipasi publik tidak dapat dicapai tanpa adanya transparansi (Krisnayanti, 2014). Transparansi diperlukan untuk menciptakan kredibilitas dan memenuhi prinsip-prinsip tata kelola yang baik (Mestry, 2004). Transparansi dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas informasi sehingga organisasi menjadi *trustful* dan *reliable*, mereduksi berbagai bentuk tindak penyimpangan/korupsi, serta mendorong peningkatan akuntabilitas publik (Joshi, 2013, Dwiharja & Kurrohman, 2017b; Anggraini, 2013 Rawlins, 2008). Studi-studi tentang transparansi dalam penyelenggaraan pendidikan memperlihatkan pengaruh positif transparansi terhadap *performance outcome* sangat signifikan (Bernstein, 2012; Larson et al., 1998). Begitu juga, akuntabilitas pengelolaan sekolah

berkontribusi terhadap kinerja guru sebesar 24,8% (Daniel Aditya Utama, 2014). (Fox, 2007) menyimpulkan *Transparency can be either 'clear' or 'opaque', while accountability can be either 'soft' or 'hard'*.

Prinsip transparansi tidak hanya berhubungan dengan keuangan, tapi juga terkait dengan perencanaan, mencakup: (1) penjelasan hasil rapat kepada masyarakat, (2) Informasi berhubungan dengan dokumen yang perlu diketahui oleh masyarakat, (3) prosedur (pengambilan keputusan atau prosedur penyusunan rencana), (4) register yang berisi fakta hukum (catatan sipil, buku tanah dll.), dan (5) peran serta masyarakat (Didjaja, 2003). (Kristianten, 2006) menyebutkan bahwa transparansi dapat diukur melalui beberapa indikator, yaitu : (1) Ketersediaan dan aksesibilitas dokumen; (2) Kejelasan dan kelengkapan hasil capaian implementasi program, dan pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan; (3) Ketersediaan sumberdaya manusia dan sumber daya non manusia dalam penyediaan dan akses memperoleh informasi tatakelola sekolah.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian bertujuan menggambarkan transparansi pengelolaan sekolah sebagai dasar dalam penyusunan model transparansi. Menggunakan metode survey dengan partisipan penelitian pengurus komite SDN di Kecamatan Jati Negara (48 SDN) dan Kecamatan Matraman (46 SDN). Dengan demikian, sasaran penelitian berjumlah 94 sekolah. Masing masing sekolah ditetapkan 6 orang pengurus komite sekolah sebagai responden. Dengan demikian responden sebanyak 248 orang. Untuk penjajagan masalah dilakukan diskusi terpumpun dalam

informasi; (3) Keterbukaan proses.; (4) kerangka regulasi yang menjamin transparansi. Selanjutnya, transparansi pengelolaan sekolah dapat dilihat dari sejauh mana : (1) kesediaan dan aksesibilitas dokumen, (2) kejelasan dan kelengkapan informasi, (3) keterbukaan proses (www.ifci.ch, 2020). Sedangkan tingkat transparansi dapat dilihat dari aspek: (1) penyediaan informasi, (2) ketepatan penggunaan informasi, dan (3) kemudahan mengakses informasi (Dwiharja & Kurrohman, 2017).

Berdasarkan penjelasan di atas, transparansi tatakelola sekolah dalam penelitian ini adalah (1) ketersediaan informasi dan akses tentang kebijakan pengelolaan sekolah, perencanaan dan program, prosedur pelaksanaan program,

dua sesi. Sesi pertama dilakukan bersama 40 orang kepala sekolah, dan sesi ke dua bersama 40 guru mewakili 94 sekolah yang dipilih secara random.

Pengumpulan data diawali dengan pendalaman kajian melalui diskusi terpumpun yang diikuti kepala sekolah dan guru. Dibuka dengan percakapan informal seputar konsep MBS, dengan pendekatan "corong" untuk wawancara (Silverman, 2005). Diskusi difokuskan pada topik yang lebih kompleks dan spesifik berkaitan dengan implementasi prinsip transparansi pada tata kelola sekolah. Setiap diskusi direkam, ditranskripkan, dianalisa dan disimpulkan sebagai temuan penelitian selain dijadikan dasar untuk penyusunan kuesioner dalam bentuk google form yang diisi 248 pengurus komite. Kuesioner dalam bentuk skala, dianalisis dengan prosentase untuk mengetahui penilaian orang tua siswa terhadap transparansi tatakelola sekolah yang dijadikan

dasar dalam penetapan model (cukup), 31 - 50 (rendah), 30 dan di bawahnya transparansi. Kategori penilaian ditetapkan: 86 (sangat rendah).
-100 (sangat tinggi), 71- 85 (tinggi), 51- 70

Hasil Penelitian

1. Profil Responden

Kepala Sekolah 40 orang

Tabel 1: Profil Kepala Sekolah

Demographis	Satus	Persen
Sex	Male	42
	Female	58
Age	31 – 40	-
	41 – 50	15
	51 – 60	85
Pendidikan Terakhir	Magister	14
	Sarjana (S1)	86
Status Pekerjaan	PNS	100
	Non-PNS	0
Masa Kerja	0 – 10 Tahun	
	11 – 20 Tahun	12
	21 – 30 Tahun	16
	31 – 40 Tahun	72
Pangkat/golongan	Penata, III/c	
	Penata Tk. I, III/d	23
	Pembina, IV/a	25
	Pembina tingkat I, IV/b ke atas	62

Sumber: data penelitian

Guru 47 orang

Tabel 2: Profil Responden Guru

Demographics	Status	Percent
Sex	Male	14
	Female	86
Age	20 - 30	21
	31 – 40	33
	41 – 50	19
	51 - 60	26
Status Pekerjaan	PNS	45
	Non-PNS	50
	Honorer	5
Masa Kerja	0 – 10 Tahun	50
	11 – 20 Tahun	29
	21 – 30 Tahun	7

	31 – 40 Tahun	14
Pangkat/Golongan	Honorer/non pangkat, golongan	55
	Penata Muda III/a	36
	Penata Muda Tk I, III/b	2
	Penata, III/c	2
	Pembina, IV/a	5
Pendidikan Terakhir	Magister	7
	Sarjana (S1)	86

Orang tua Siswa berjumlah 248 orang

Tabel 3: Profil Responden Orang Tua Siswa

Demographis		Percent
Sex	Male	35
	Female	65
	Total	100
Age	20 – 30	9
	31 – 40	50
	41 – 50	37
	51 – 60	4
Status Pekerjaan	Mengurus Rumah Tangga	50
	Buruh	7
	Freelance	4
	Pegawai Swasta	13
	Wiraswasta	9
Pendapatan Perbulan	Guru	17
	1000.000 sd 2.500.000	59
	2,500,000 sd 5.000.000	30
Pendidikan Terakhir	>5.000.000	11
	Sarjana (S1)	28
	Diploma	6
	SMA	67

Sumber: google form

2. Transparansi Tatakelola

Prinsip transparansi merupakan sebuah keniscayaan yang harus diterapkan dalam Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Terdapat tiga hal yang penting untuk dikaji secara ilmiah berkaitan dengan implementasi prinsip transparansi tatakelola sekolah, diantaranya: (1) ketersediaan informasi, (2) ketepatan media dan sarana informasi yang digunakan, (3) ketersediaan sumber daya manusia, serta (4) dukungan orang tua dan kebijakan.

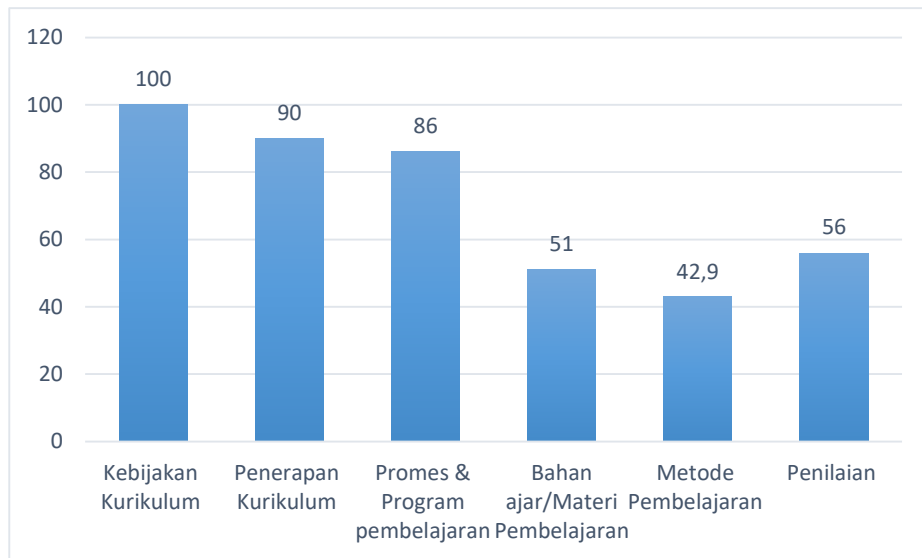
a. Ketersediaan informasi di sekolah

1) Ketersediaan Informasi akademik

Hasil penelitian menunjukkan ketersediaan dan kemudahan akses informasi akademik: (a) kebijakan kurikulum tersedia dan dapat diakses di seluruh sekolah (100%), (b) penerapan kurikulum tersedia dan dapat diakses di 90% sekolah, (c) program semester dan rencana program pembelajaran tersedia dan dapat diakses di 86% sekolah, (d) bahan ajar/materi pembelajaran hanya tersedia dan dapat diakses di 51% sekolah, (e) metoda

pembelajaran yang digunakan tersedia dan dapat diakses di 42,9% sekolah, dan (f) penilaian tersedia

dan dapat diakses di 56% sekolah. Secara diagramatik informasi akademik dapat dilihat di bawah ini.



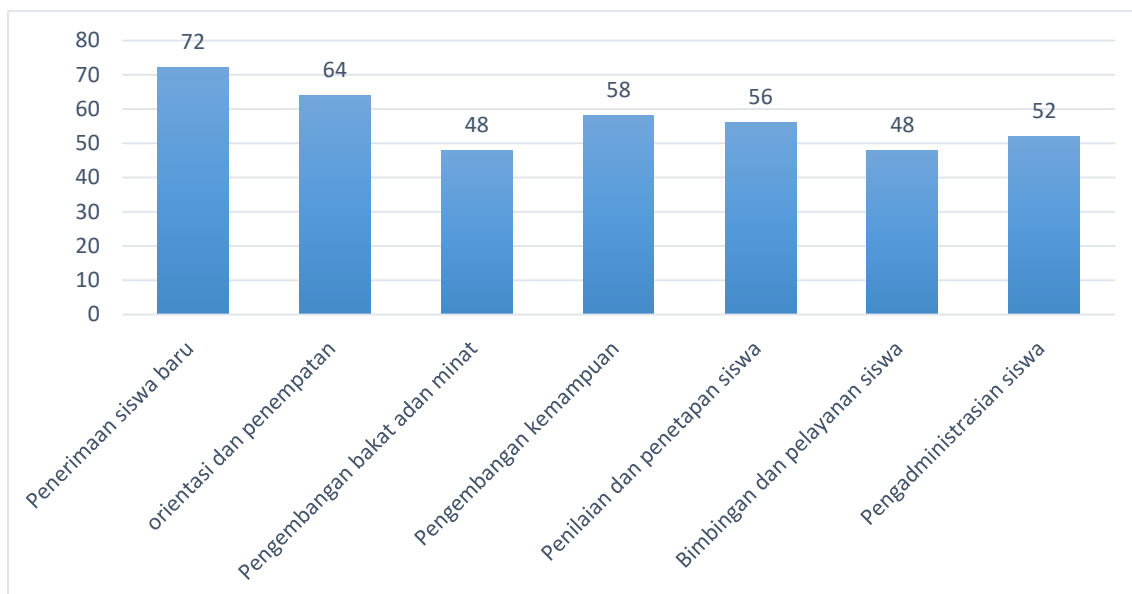
Gambar 1: Ketersediaan Informasi Akademik di Sekolah

Dapat dianalisis, secara keseluruhan ketersediaan dan kemudahan akses informasi akademik dalam ketegori tinggi (71%). Namun pada umumnya baru memfokus pada penyediaan informasi kebijakan dan penerapan kurikulum, masih mengabaikan penyediaan informasi bahan ajar, metodologi dan penilaian pembelajaran.

2) Ketersediaan dan akses Informasi Kesiswaan

Hasil penelitian menunjukkan ketersediaan dan kemudahan akses informasi kesiswaan : (a) penerimaan siswa baru, tersedia dan dapat diakses di 72% sekolah,

(b) orientasi dan penempatan tersedia dan dapat diakses di 64% sekolah, (c) pengembangan bakat dan minat tersedia dan dapat diakses di 48% sekolah, (d) pengembangan kemampuan akademik tersedia dan dapat diakses di 58% sekolah, (e) penilaian dan penetapan siswa berprestasi tersedia dan dapat diakses di 56% sekolah, (f) bimbingan dan pelayanan siswa tersedia dan dapat diakses di 48% sekolah, dan (g) pengadministrasian siswa dapat diakses di 52% sekolah. Secara diagramatik ketersediaan dan akses informasi kesiswaan dapat dilihat di bawah ini.

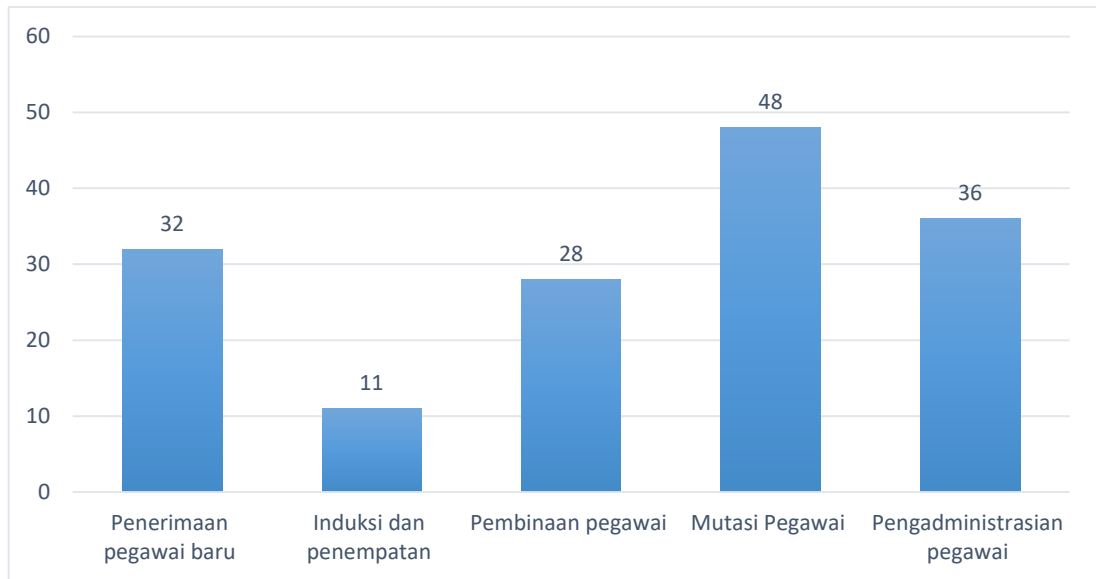


Gambar 2: Ketersediaan Informasi Kesiswaan di Sekolah

Berdasar data di atas, dapat dianalisis, ketersediaan dan kemudahan akses informasi kesiswaan dalam kategori sedang. Hanya dalam penerimaan siswa baru, orientasi dan penempatan dalam kategori tinggi, sedangkan lainnya dalam kategori kurang. Dengan demikian, aspek ketersediaan dan kemudahan akses informasi kesiswaan perlu mendapat perhatian, karena siswa merupakan subyek utama dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah.

3) Kesiediaan informasi ketenagaan

Hasil penelitian menunjukkan ketersediaan dan kemudahan akses informasi ketenagaan: (a) penerimaan pegawai baru tersedia dan dapat diakses di 32% sekolah, (b) induksi dan penempatan tersedia dan dapat diakses di 11% sekolah, (c) pembinaan pegawai tersedia dan dapat diakses di 28% sekolah, (d) mutasi pegawai tersedia dan dapat diakses di 48% sekolah, (e) pengadministrasian pegawai tersedia dan dapat diakses di 36% sekolah. Secara diagramatik ketersediaan dan akses informasi ketenagaan dapat dilihat di bawah ini.



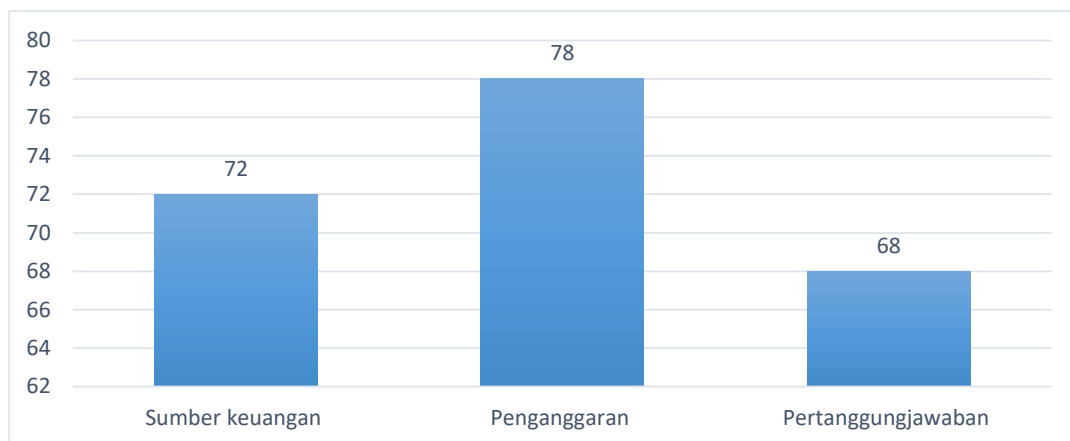
Gambar 3: Ketersediaan Informasi Ketenagaan di Sekolah

Berdasar data di atas, dapat dianalisis, ketersediaan dan kemudahan akses tentang kepegawaian dalam kategori sangat rendah (25%). Hal tersebut karena para orang tua menganggap bukan persoalan yang berkaitan langsung dengan kepentingan pembelajaran anak. Informasi tentang mutasi guru cukup menjadi perhatian, karena perpindahan guru berdampak terhadap kegiatan pembelajaran putra putri mereka.

- 4) Ketersediaan informasi tentang keuangan

Hasil penelitian menunjukkan ketersediaan dan kemudahan akses informasi tentang keuangan: (a) sumber keuangan tersedia dan dapat diakses di 72% sekolah, (b) pengalokasian/penganggaran tersedia dan dapat diakses di 78% sekolah, (c) pertanggung-jawaban keuangan tersedia dan dapat diakses di 68% sekolah.

Secara diagramatik ketersediaan dan akses informasi ketenagaan dapat dilihat di bawah ini.



Gambar 4: Ketersediaan Informasi Keuangan di Sekolah

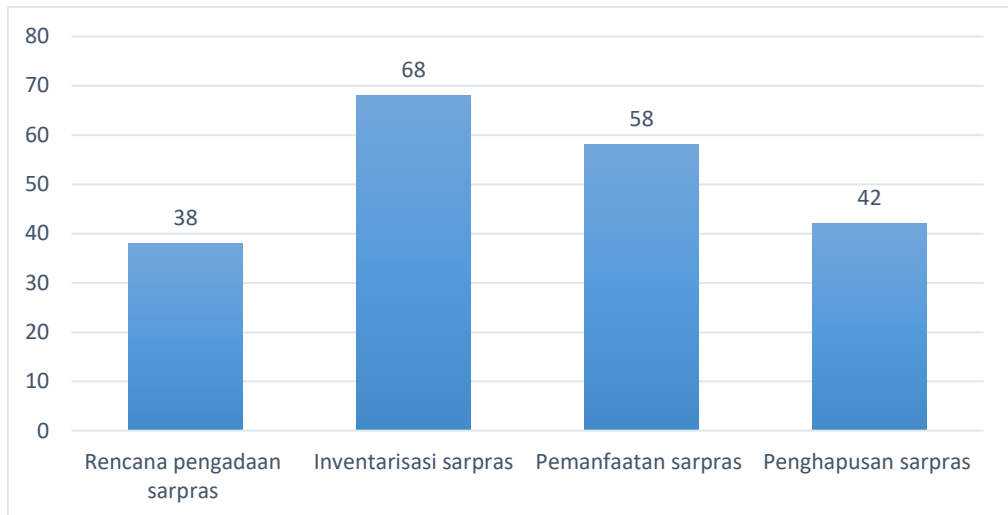
Berdasar data di atas, dapat dianalisis ketersediaan dan kemudahan akses informasi keuangan dapat dikategorikan tinggi. Hal tersebut karena SDN DKI Jakarta sudah menggunakan aplikasi e-anggaran, sehingga public, utamanya para orang tua siswa melalui komite sekolah dapat mengakses informasi keuangan sekolah, utamanya terkait pengelolaan dana BOP.

5) Ketersediaan informasi tentang sarana dan prasarana

Hasil penelitian menunjukkan ketersediaan dan kemudahan akses informasi sarana dan prasarana: (a)

rencana pengadaan sarana dan prasarana tersedia dan dapat diakses di 38% sekolah, (b) inventarisasi sarana dan prasarana tersedia dan dapat diakses di 68% sekolah, (c) penggunaan/pemanfaatan sarana dan prasarana tersedia dan dapat diakses di 58% sekolah, (d) penghapusan sarana dan prasarana tersedia dan dapat diakses di 42% sekolah.

Secara diagramatik ketersediaan dan akses informasi sarana dan prasarana dapat dilihat di bawah ini.

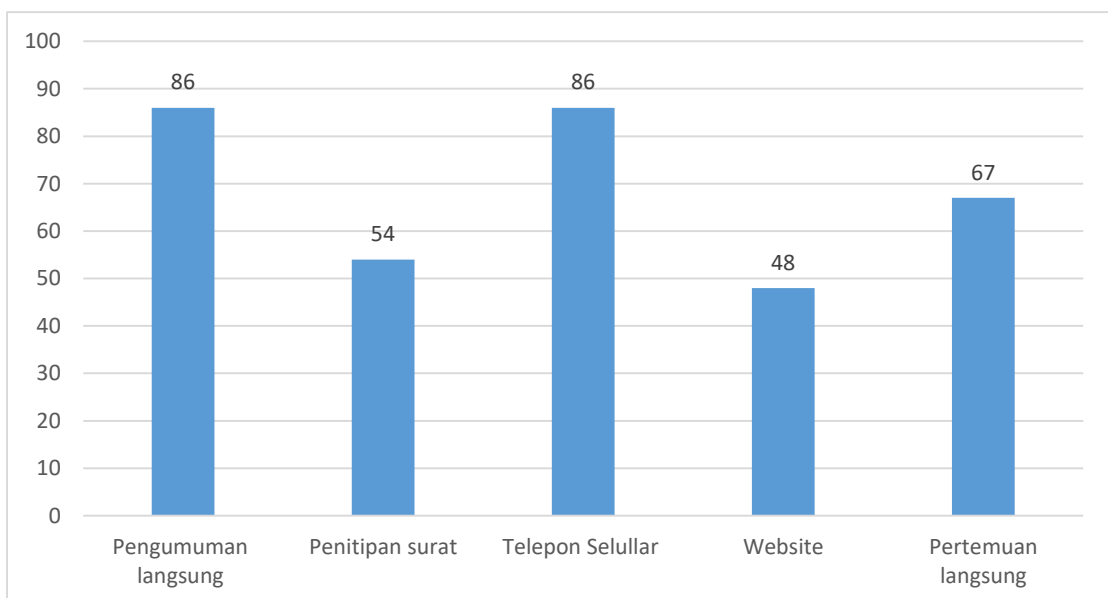


Gambar 5: Ketersediaan Informasi Sarana dan Prasarana di Sekolah

Berdasar data di atas, dapat dianalisis informasi dan kemudahan akses informasi dalam kategori sedang bahkan cenderung kurang. Dalam inventarisasi dan pemanfaatan sekolah dinilai para orang tua tinggi.

b. Media penyampaian informasi di sekolah

Media informasi yang digunakan sekolah dalam penyampaian informasi adalah: (1) pengumuman langsung (86%), penitipan surat (54%), telepon selular (WA) 86%, web site (48%), papan dinding (61%) dan pertemuan langsung (67%). Secara diagramatik dapat dilihat di bawah ini.

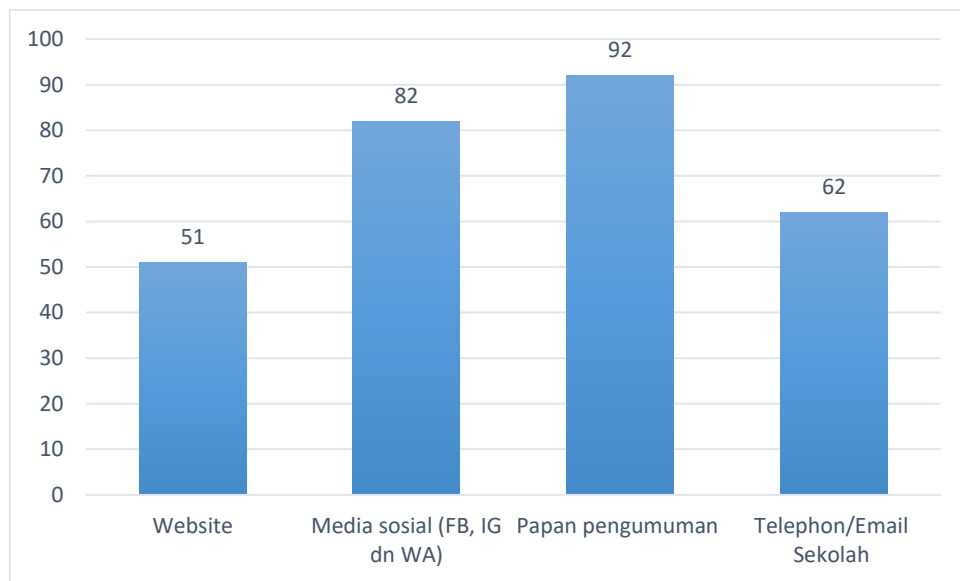


Gambar 6: Media Penyampaian Informasi di Sekolah

Berdasarkan uraian di atas dapat dianalisis, pada umumnya sekolah menggunakan media informasi konvensional dan manual, sehingga diduga setiap informasi yang disampaikan sering terjadi distorsi atau bahkan tidak sampai. Oleh karena itu dibutuhkan manajemen sistem informasi transparansi secara komprehensif.

c. Sarana pendukung akses informasi

Sarana prasarana yang dimiliki sekolah yang dapat digunakan untuk membuka akses informasi adalah : (1) website sekolah, 51%, (2) Media sosial (FB, IG dan WA sekolah), 82%, (3) papan pengumuman, 92%, (4) telepon/email sekolah, 62%. Secara diagramatik dapat dilihat di bawah ini.



Gambar 7: Sarana Pendukung Akses Informasi di Sekolah

Berdasarkan uraian di atas dapat dianalisis, setiap sekolah potensial menyediakan informasi yang mudah diakses, karena pada umumnya memiliki media informasi seperti papan pengumuman, telepon seluler, email, internet dan website.

d. Dukungan mewujudkan transparansi di sekolah

1) Dukungan orang tua siswa

Dukungan orang tua untuk mewujudkan

transparansi tatakelola sekolah cukup baik, yang ditunjukkan dengan adanya kesediaan para orang tua berpartisipasi baik dalam bentuk ide, tenaga, fasilitas, dan dana, serta keberanian menyampaikan kritik serta saran kepada sekolah untuk perbaikan program dan pelaksanaan pendidikan. Seluruh orang tua bahkan sangat mendukung terhadap

penerapan prinsip transparansi tatakelola di sekolah.

2) Kebijakan Nasional

Kebijakan nasional dalam implementasi transparan di sekolah tertuang dalam penerapan MBS yang mengusung prinsip transparansi melalui penyebaran informasi sekolah kepada masyarakat dengan tujuan memperoleh kepercayaan masyarakat. Tumbuhnya kepercayaan masyarakat merupakan langkah awal dalam meningkatkan peran serta masyarakat di sekolah.

Keberlangsungan MBS di Indonesia tertuang dalam Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 48 ayat (1) yang berbunyi bahwa pengelolaan dana pendidikan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparan dan akuntabel. Hal tersebut mengandung makna pengelolaan dana pendidikan yang berasal dari pemerintah maupun masyarakat harus dilandasi

dengan prinsip tranparasni dan akuntabilitas. Selanjutnya Pasal 51 Ayat (1) dinyatakan bahwa: "Pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah. Disamping itu, keberlanjutan program MBS juga dilandasi Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah lainnya yang menyiratkan MBS pada dasarnya mengembangkan manajemen sekolah secara menyeluruh dengan penekanan pada komponen-komponen tertentu, termasuk implementasi prinsip transparansi.

3) Kebijakan pemerintah daerah

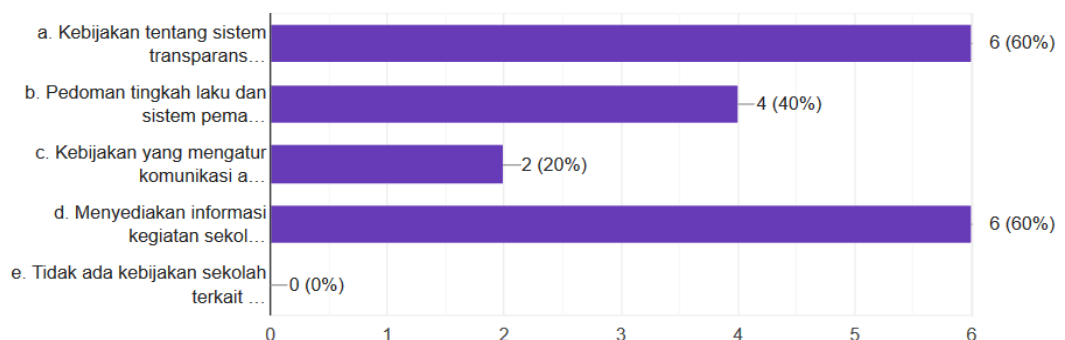
Pelimpahan wewenang yang terjadi di daerah memberikan dampak yang besar terhadap pengelolaan keuangan public, termasuk pada lembaga pendidikan.

Pola pembiayaan pendidikan setelah diberlakukannya otonomi daerah, pemerintah daerah baru mencapai taraf pemenuhan kebutuhan operasional secara relative. Sistem transparansi di Provinsi DKI Jakarta sudah diterapkan melalui aplikasi <https://bos.kemdikbud.go.id>. Tetapi hal tersebut hanya berkaitan dengan pendanaan BOS dan BOP, belum menyentuh komponen-komponen manajemen lainnya, seperti personalia, kurikulum dan pembelajaran, kesiswaan, sarana prasarana dan lainnya.

4) Kebijakan Sekolah

Kebijakan sekolah dalam implementasi prinsip transparansi diwujudkan

dengan penyediaan informasi kegiatan sekolah kepadamasyarakat sebagai penerima manfaat pelayanan pendidikan (60%), kebijakan sekolah tentang sistem transparansi-akuntabilitas serta mekanisme pertanggungjawabannya (60%), pedoman tingkah laku dan sistem pemantauan kinerja penyelenggara sekolah yang dilengkapi sistem pengawasan dengan sanksi jelas dan tegas (40%) serta kebijakan yang mengatur komunikasi antara sekolah dan publik dalam pemberian tanggapan terhadap pertanyaan dan pengaduan public (20%). Secara diagramatik dapat dilihat di bawah ini.



Gambar 8: Kebijakan Sekolah Terkait Transparansi Sekolah

Berdasar paparan data di atas, dapat dianalisis pada umumnya seluruh sekolah mendukung bahkan sudah menerapkan prinsip transparansi dalam tatakelolanya, yang diwujudkan ke dalam kebijakan dan berbagai peraturan di sekolah.

3. Kebutuhan Sistem Informasi Transparansi Tatakelola Sekolah

Berdasarkan analisis ketersediaan dan akses informasi dalam penyelenggaraan pendidikan, ketersediaan sumber daya dan kebijakan, dapat dirumuskan beberapa hal.

- a. Ketersediaan dan akses informasi di sekolah masih bersifat manual yang dilakukan melalui pertemuan langsung, melalui telepon selular, atau menitipkan informasi melalui siswa untuk disampaikan kepada orang tua. Dengan demikian media komunikasi yang potensial dikembangkan adalah media komunikasi selular melalui sistem mobile transparansi tatakelola sekolah.
- b. Sumber daya manusia, dalam hal ini orang tua siswa sangat

mendukung penerapan terhadap penerapan transparansi di sekolah, yang ditunjukkan dengan kesediaan transparansi. Para guru muda yang memiliki kemampuan mengoperasikan teknologi informasi yang baik merupakan asset sekolah jika sistem e-transparansi digunakan.

- c. Sarana website dan internet tersedia hampir di seluruh sekolah. Para orang tua siswa juga memiliki perangkat seluler sendiri yang dapat digunakan dalam menjalankan keterbukaan akses informasi, sehingga pengembangan sistem transparansi melalui mobile dan website menjadi potensi yang dapat dikembangkan
- d. Media informasi yang selama ini digunakan untuk menyebarkan informasi berupa telepon seluler (jaringan komunikasi melalui WA), ruang kantor dengan lemari penyimpanan, papan pengumuman dan sebagian kecil menggunakan website.
- e. Kebijakan penerapan prinsip transparansi dalam

penyelenggaraan sekolah, memiliki payung hukum yang kuat baik di tingkat nasional, daerah dan sekolah.

Berdasarkan uraian di atas, ditetapkan peta potensi berdasarkan tiga tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Komponen MBS terdiri dari : (1) kurikulum dan kegiatan pembelajaran; (2) kesiswaan; (3) pendidik dan tenaga kependidikan serta

pengembangannya; (4) sarana dan prasarana; (5) keuangan dan pembiayaan; (6) peran serta masyarakat dan kemitraan; (7) budaya dan lingkungan sekolah.

Berdasarkan analisis kondisi seperti yang disebutkan sebelumnya, maka tujuh komponen dalam implementasi manajemen berbasis sekolah dikembangkan melalui draf model transparansi.



Gambar 9: Sistem Manajemen Tata Kelola Sekolah.

4. Model Transparansi Yang Dibutuhkan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis potensi di atas, maka model transparansi yang dibutuhkan adalah model transparansi berdasarkan 4

fungsi dan tujuh komponen manajemen.

a. Data yang harus disediakan

Data terkait dengan fungsi manajemen mulai perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan sebagai berikut.

Tabel 4: Data yang Dibutuhkan Untuk Sisten Transparansi Tata Kelola Sekolah

Tahap Perencanaan	Data yang dibutuhkan
Why	Latar belakang kegiatan komponen/bidang manajemen sekolah yang sedang direncanakan, meliputi: <ul style="list-style-type: none"> Sejarah kegiatan Peraturan perundangan yang melandasi kegiatan Pentingnya komponen/bidang manajemen tersebut dilaksanakan
What	<ul style="list-style-type: none"> Konsep dasar komponen/bidang manajemen sekolah yang sedang direncanakan: pengertian, tujuan, dan prinsip-prinsip Jenis-jenis kegiatan yang akan dilaksanakan Rincian sumber daya yang digunakan dalam pelaksanaan (manusia, dana, sarana dan prasarana)
Who	Pelaksana kegiatan komponen/bidang manajemen sekolah yang sedang direncanakan.
When	Rincian waktu atau jadwal pelaksanaan manajemen sekolah yang sedang direncanakan.
Where	Rincian tempat kegiatan pelaksanaan untuk tiap-tiap jenis kegiatan yang sedang direncanakan.
How	<i>Standard Operational Procedure (SOP)</i> , berupa prosedur pelaksanaan kegiatan komponen/bidang manajemen sekolah yang sedang direncanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
Tahap Pengorganisasian	Data yang dibutuhkan
proses kegiatan memilih, membentuk hubungan kerja, menyusun deskripsi tugas dan wewenang orang-orang yang terlibat dalam kegiatan komponen/bidang manajemen sekolah tertentu sehingga terbentuk kesatuan tugas dan struktur organisasi yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan peningkatan mutu sekolah	(1) adanya kejelasan tugas dan wewenang, (2) adanya kesatuan perintah, (3) fleksibel, (4) semua orang atau unit kerja memahami tujuan yang akan dicapai, (5) Teknik dalam penggunaan sumber daya, dan (6) Memahami strategi dan metode/ teknik yang digunakan dalam melaksanakan tugasnya.
Tahap Pelaksanaan	Data yang dibutuhkan
implementasi dari perencanaan dan pengorganisasian yang telah disusun organisasi yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan peningkatan mutu sekolah	(1) penetapan standar operasional kegiatan, (2) penentuan ukuran keberhasilan kegiatan, (3) melakukan pengembangan kegiatan atau tindakan koreksi jika diperlukan.
Tahap Pengawasan	Data yang dibutuhkan
pemantauan,	Instrument pemantauan
supervisi,	Instrument supervisi
evaluasi,	Instrument evaluasi
pelaporan, dan	Format laporan
tindak lanjut hasil pengawasan.	Format Tindak lanjut hasil pengawasan

Data terkait dengan komponen manajemen berbasis sekolah sebagai berikut:

- 1) Manajemen Kurikulum dan Pembelajaran
 - a) Perencanaan (pembuatan silabus dan RPP)
 - b) Penyusunan kalender sekolah
 - c) Pembagian tugas mengajar dan

- penyusunan jadwal mengajar
- d) Program semester
- e) RPP
- f) Bahan ajar
- g) Media
- h) Penilaian pembelajaran (pelaksanaan penilaian, analisis hasil penilaian dan tindak lanjut hasil penilaian)

- i) Pengawasan melalui supervisi pembelajaran
 - j) Penyusunan peraturan akademik (persyaratan kehadiran, ulangan, remedial, ujian, kenaikan kelas, kelulusan, hak siswa, pelayanan konsultasi/bimbingan).
 - k) Penentuan beban belajar (sistem pembelajaran, beban belajar)
 - l) Pemilihan Strategi PAKEM : kosep dasar, model/strategi mengajar, prinsip dan Keunggulan, serta ciri-ciri PAKEM, serat ciri ciri PAKEM
 - m) Pengawasan dan evaluasi serta pelaporan
- 2) Manajemen Peserta Didik
- a) Pendataan calon peserta didik
 - b) Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)
 - c) Pengenalan sekolah/ orientasi peserta didik
 - d) Pengelompokan peserta didik
 - e) Pembinaan karakter peserta didik
 - f) Penyelenggaraan layanan khusus
 - g) Pengawasan, evaluasi dan pelaporan
- 3) Manajemen Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berbasis Sekolah
- a) Perencanaan kebutuhan
 - b) Rekrutmen/pengadaan
 - c) Pembinaan
 - d) Pemberian motivasi
 - e) Rotasi Kerja
 - f) Pemberhentian
 - g) Pengawasan, evaluasi kinerja dan pelaporan
- 4) Manajemen Sarana dan Prasarana Berbasis Sekolah
- a) Analisis kebutuhan dan perencanaan
 - b) Pengadaan
 - c) Inventarisasi
 - d) Pendistribusian dan pemanfaatan
 - e) Pemeliharaan
 - f) Penghapusan
 - g) Pengawasan, evaluasi dan pelaporan
- 5) Manajemen Pembiayaan Berbasis Sekolah
- a) Penyusunan Rencana Kerja Sekolah (RKS)/Rencana Kerja Jangka Menengah (RKJM) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT)
 - b) Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS)
 - c) Penggalian sumber-sumber
 - d) Pembukuan
 - e) Penggunaan sesuai peraturan perundangan
 - f) Pengawasan, evaluasi dan pelaporan
- 6) Manajemen Hubungan Sekolah dan Masyarakat Berbasis Sekolah
- a) Analisis kebutuhan
 - b) Penyusunan program
 - c) Pembagian tugas pelaksana
 - d) Pelaksanaan kegiatan
 - e) Pengawasan, evaluasi, dan pelaporan
- 7) Manajemen Budaya dan Lingkungan Berbasis Sekolah
- a) Perencanaan program kegiatan
 - b) Sosialisasi program kegiatan
 - c) Pelaksanaan program kegiatan
 - d) Pengawasan, evaluasi dan pelaporan program kegiatan

- b. Sumber Daya Manusia dan Sarana
yang dibutuhkan

**Tabel 5: Sumber Daya yang Dibutuhkan Transparansi
Tatakelola Sekolah**

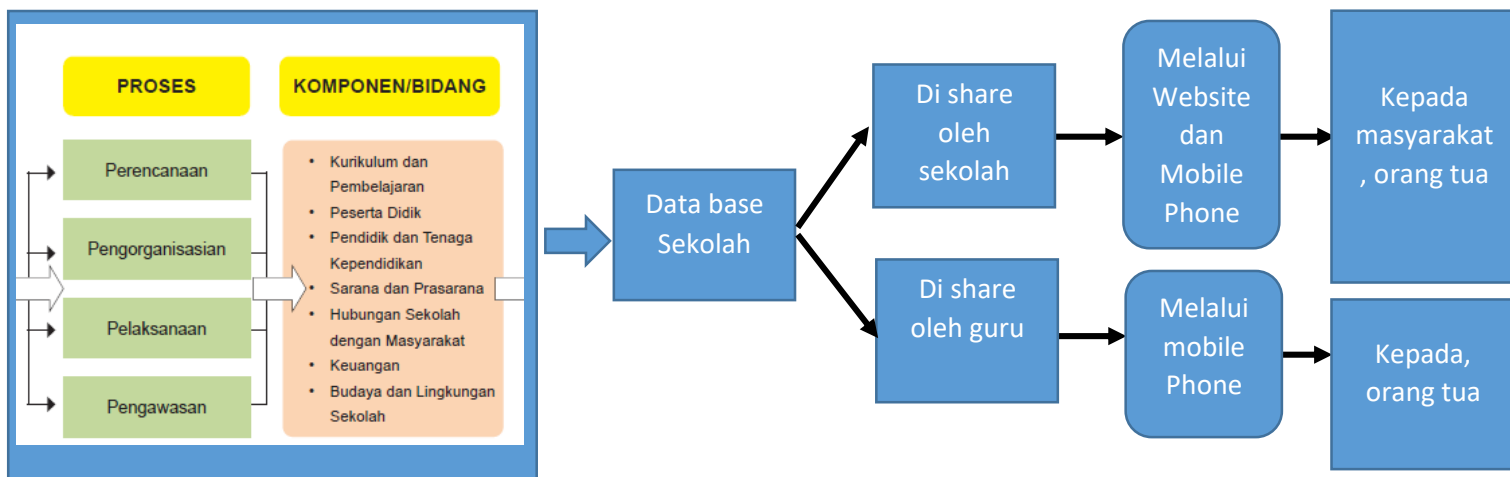
Komponen	Kriteria SDM	Perangkat dan Pendukung	Kemitraan
1. Manajemen Kurikulum dan Pembelajaran Berbasis Sekolah	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Sekolah • Wakil Kurikulum • Wali Kelas • Komite Sekolah • Koordinastor kelas • Orang tua siswa • Masyarakat • Operator untuk data base 	<ul style="list-style-type: none"> • Data base • Computer untuk database dan website • Mobile phone masing-masing warga sekolah • internet 	Sekolah, orang tua siswa dan masyarakat
2. Manajemen Peserta Didik Berbasis Sekolah	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Sekolah • Wakil Kesiswaan • Wali Kelas • Komite Sekolah • Koordinastor kelas • Orang tua siswa • Masyarakat • Operator untuk data base 	<ul style="list-style-type: none"> • Data base • Computer untuk database dan website • Mobile phone masing-masing warga sekolah • internet 	Sekolah, orang tua siswa dan masyarakat
3. Manajemen Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berbasis Sekolah	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Sekolah • Wakil Kurikulum • Wali Kelas • Komite Sekolah • Koordinastor kelas • Orang tua siswa • Masyarakat • Operator untuk data base 	<ul style="list-style-type: none"> • Data base • Computer untuk database dan website • Mobile phone masing-masing warga sekolah • internet 	Sekolah, orang tua siswa dan masyarakat
4. Manajemen Sarana dan Prasarana Berbasis Sekolah	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Sekolah • Wakil Sarana Prasarana • Wali Kelas • Komite Sekolah • Koordinastor kelas • Orang tua siswa • Masyarakat • Operator untuk data base 	<ul style="list-style-type: none"> • Data base • Computer untuk database dan website • Mobile phone masing-masing warga sekolah • internet 	Sekolah, orang tua siswa dan masyarakat
5. Manajemen Pembiayaan Berbasis Sekolah	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Sekolah • Wakil Kurikulum • Bendahara • Wali Kelas • Komite Sekolah • Koordinastor kelas • Orang tua siswa • Masyarakat • Operator untuk data base 	<ul style="list-style-type: none"> • Data base • Computer untuk database dan website • Mobile phone masing-masing warga sekolah • internet 	Sekolah, orang tua siswa dan masyarakat

6. Manajemen Hubungan Sekolah dan Masyarakat Berbasis Sekolah	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Sekolah • Wakil Kurikulum • Humas Sekolah • Wali Kelas • Komite Sekolah • Koordinastor kelas • Orang tua siswa • Masyarakat • Operator untuk data base 	<ul style="list-style-type: none"> • Data base • Computer untuk database dan website • Mobile phone masing-masing warga sekolah • internet 	Sekolah, orang tua siswa dan masyarakat
7. Manajemen Budaya dan Lingkungan Berbasis Sekolah	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Sekolah • Wakil Kurikulum • Wali Kelas • Komite Sekolah • Koordinastor kelas • Orang tua siswa • Masyarakat • Operator untuk data base 	<ul style="list-style-type: none"> • Data base • Computer untuk database dan website • Mobile phone masing-masing warga sekolah • internet 	Sekolah, orang tua siswa dan masyarakat

c. Menetapkan Sistem

Berdasarkan analisis di atas, sistem informasi yang dibutuhkan dalam transparansi tata Kelola sekolah adalah berbasis

mobile phone untuk orang tua siswa, website untuk masyarakat dan orang tua siswa, seperti tergambar di bawah ini.



Gambar 10: Sistem model Transparansi di Sekolah

Kesimpulan dan Rekomendasi

Kesimpulan

a. Ketersediaan dan kemudahan akses informasi pengelolaan sekolah secara umum dalam katagori cukup. Secara rinci,

informasi: (1) akademik dalam kategori tinggi, namun masih memfokus pada informasi kebijakan dan penerapan kurikulum, mengabaikan informasi tentang pembelajaran; (2) Kesiswaan sedang,

hanya dalam penerimaan siswa baru, orientasi dan penempatan dalam kategori baik; (3) Kepegawaian dalam kategori rendah, karena para orang tua menganggap tidak berkaitan langsung dengan pembelajaran; (4) Keuangan dalam kategori tinggi, Hal tersebut karena SDN DKI Jakarta sudah menggunakan aplikasi e-anggaran; (4) Media informasi masih konvensional dan manual sehingga informasi yang disampaikan sering terjadi distorsi; (5) Dukungan orang tua dan pemerintah untuk penyelenggaraan transparansi tatakelola sekolah dalam katagori tinggi.

- b. Ketersediaan informasi, personil sekolah, orang tua, sarana, IT, dan kebijakan potensial untuk mewujudkan transparansi tatakelola sekolah melalui mobile phone, website sebagai data base informasi, dengan syarat tersedia : (1) Informasi seluruh aspek manajerial; (2) Sarana informasi berupa computer dan internet; (3) Tenaga personil khusus yang terlatih; (4) Literasi informasi orang tua; (5) Pemerintah meyediakan system, sumber daya perronil dan perangkat IT.
- c. Sistem informasi transparansi tatakelola sekolah yang kembangkan mencakup tatakelola tingkat sekolah kelas (manajamen kelas dan pembelajaran) dapat dikembangkan melalui media komunikasi personal yaitu media selular.

Rekomendasi

Penelitian ini merekomendasikan pemerintah dapat mendukung penuh dalam menerapkan sistem transparansi yang dikembangkan dengan cara mendorong sumber daya manusia (kepala sekolah, guru) untuk dapat berperan aktif dalam melakukan

ujicoba model sistem transparansi melalui mobile phone. Selain itu, pemerintah dapat mendukung ketersediaan sarana prasarana yang dibutuhkan seperti computer, internet dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Sekolah juga diharapkan merespon positif terhadap sistem informasi tatakelola yang akan diujicobakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, R. D. (2013). Transparansi , Partisipasi , dan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Dana BOS Dalam Program RKAS di SDN Pacarkeling VIII Surabaya. *Kebijakan Dan Manajemen Publik*, 1(2), 201–208.
- Ardani, E. F., & Trihantoyo, S. (2020). Penerapan Transparansi Dan Akuntabilitas Dana Bantuan Operasional Sekolah (Bos) Guna Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Di Lingkungan Sd Negeri Banyu Urip Viii Surabaya. *Jurnal Inspirasi Manajemen Pendidikan*, 8(3).
- Bernstein, E. S. (2012). The transparency paradox: A role for privacy in organizational learning and operational control. *Administrative Science Quarterly*, 57, 181–216.
- Bozbayindir, F. (2016). Developing of a School Transparency: A Study on Validity and Reliability, International Online. *Journal of Educational Sciences*, 4(5).
- Cheong, Y. (1996). *School Effectiveness and School-Based Management*, The Falmer Press.
- Daniel Aditya Utama, S. R. (2014). Pengaruh Transparansi, akuntabilitas, dan Respnabilitas Pengelollan Keuangan Sekolah terhadap Kinerja Guru. *Jurnal Pendidikan Ekonomi Dinamika*

- Pendidikan*, IX(2), 100–114.
- Didjaja, M. (2003). *Transparansi Pemerintah*. Rineka Cipta.
- Dwiharja, I. M., & Kurrohman, T. (2017a). Pengaruh akuntabilitas dan transparansi pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja sekolah (APBS) terhadap partisipasi komite sekolah (studi empiris pada sekolah dasar negeri se-kecamatan patrang kabupaten jember). *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 1(3), 181–193.
- Dwiharja, & Kurrohman. (2017b). Pengaruh akuntabilitas dan transparansi pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja sekolah (apbs) terhadap partisipasi komite sekolah (studi empiris pada sekolah dasar negeri se-kecamatan patrang kabupaten jember). *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 1(2), 181–193.
- Ekonomi, W. (2021). *Transparansi*.
- Etzioni, A. (2010). Is Transparency the Best Disinfectant? *Journal of Political Philosophy*, 18(4), 389–404. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9760.2010.00366.x>
- Fitzsimons, P. (2015). Human Capital Theory and Education. *Encyclopedia of Educational Philosophy and Theory*.
- Fox. (2007). *The uncertain relationship between transparency and accountability. Development in practice*. 17(4–5), 663–671.
- Istikhomah, A. D. (2019). Pengaruh Literasi Terhadap Kepercayaan Muzaki Pada Lembaga Pengelola Zakat Dengan Akuntabilitas Dan Transparansi. *Economic Education Analysis Journal*, 8(1).
- Joshi. (2013). Do they work? Assessing the impact of transparency and accountability initiatives in service delivery. *Development Policy Review*, 31, 29–48.
- Peraturan Presiden No 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, (2010).
- Kompas. (2012). *Pendidikan*.
- Krisnayanti Ida Ayu Putu Ari. (2014). Analisis persepsi stakeholder internal dan eksternal terhadap transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan pengelolaan dana bos di smp negeri 1 banjar tahun 2013. *Jurnal Pendidikan Ekonomi Undiksha*, 4(1). ejournal.undiksha.ac.id
- Kristianten. (2006). *Transparansi Anggaran Pemerintah*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Larson, R., Bengtsson, L., Henrikson, K., & J., S. (1998). The inter-organizational dilemma: Collective knowledge development in strategic alliances. *Organization Science*, 285–305.
- Mann, R. (2019). *What transparency in business means to us and why it gets the best results*. www.Monday.Com.
- Merdeka, G. P. (2014). *Transparansi Keuangan Sekolah*. YSKK GEMA PENA, Merdeka.
- Mestry, R. (2004). Financial accountability: the principal or the school governing body? *South African Journal of Education*, 24(2), 126–132.
- Nurdiani, M. S., & Nugraha. (2018). Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Sekolah. *Jurnal Pendidikan Akuntansi Dan Keuangan Sekolah*, 6(1).
- Nurhattati. (2017). *Perbandingan Partisipasi Guru dalam Pengambilan Keputusan di SDN dan SDS: Studi Kasus di SDN Rawamangun13 dengan SD Kinderfield Jakarta Timur*.

- Nurhattati. (2020). *Model transparansi pengelolaan sekolah dasar negeri*.
- Parker, C., Klaseen, B., Hill, J., & Jacobss, S. H. (2000). Reducing the Risk of Policy Failure: Challenges for Regulation Compliance, Paris: OECD, hlm 20-23. In *OECD* (pp. 20–23).
- Raeni. (2014). Pengaruh prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan terhadap produktivitas smk. *Economic Education Analysis Journal*, 3(1).
- Rawlins, B. (2008). Measuring the relationship between organizational transparency and employee trust. *Public Relation Journal*, 2(2).
- Robichaud, F. (2013). *Clear and Transparent Information*. Community Relations.
- Sagala, S. (2013). Menyusun rencana pengembangan sekolah dengan prinsip partisipatif transparan dan akuntabe. In *Unimed*.
- Schackenberg, A. ., & Tomlinson, E. (2020). The dimensional structure of transparency: A construct validation of transparency as disclosure, clarity, and accuracy in the organization. In *Sage Journals*.
- Shafirattunnisa, F. (2016). *Penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan kepada stakeholders di SD Islam Binakheir*. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/29713>
- Undang-Undang Sisdiknas, 2003 (2003).
- UNDP. (1997). *Center for development and the environment university of oslo VComply Editorial*.
- Wardani, P. A. S. K., Dewi, G. A. K. R. S., & Kurniawan, P. S. (2019). Analisis Penyebab Terjadinya Fraud Dalam Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (Studi Kasus Pada Sekolah Dasar Di Kecamatan Buleleng. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha*, 10(2).
- www.ifci.ch. (2020). *Accounting International Standard (AIS) no,2 (revisi 1998), Canadian Institute of Chartered Accountants (CICA), U.S Financial Accounting Standard's Board (FASB), Statement of Financial Accounting Concepts No.2 & 5*.